RANWAL RENJA



RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA
TAHUN 2027

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NUNUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN NUNUKAN

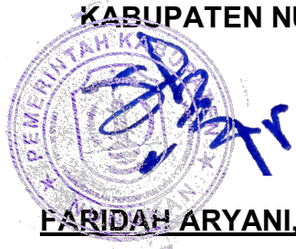
KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Hidayahnya atas tersusunnya Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Nunukan Tahun 2027, Penyusunan Ranwal Renja Tahun 2027 ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029.

Rencana Awal Rencana Kerja ini memuat target tujuan, sasaran, program serta strategi implementasi program/kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan Tahun 2027, sehingga dapat memberikan arah yang jelas dan pedoman pelaksanaan tugas bagi seluruh Aparatur/Pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Nunukan dalam menjalankan tugas melalui koordinasi baik eksternal maupun internal dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Nunukan. Penyusunan Rencana Kerja ini juga bertujuan untuk mewujudkan Pembangunan Kesejahteraan Sosial masyarakat yang Terencana, Terarah, Terintegrasi dan Berkesinambungan dari setiap Program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Nunukan pada setiap Tahun Anggaran.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan rancangan rencana kerja Tahun 2027 ini. Kami menyadari sepenuhnya buku ini masih membutuhkan perbaikan dan penyempurnaan. Oleh karena itu kami mengharap masukan, kritik dan sumbang saran dari semua pihak agar pelaksanaan program pembangunan bidang sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anakn di Kabupaten Nunukan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Semoga buku tentang Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2027 ini dapat bermanfaat untuk pelaksanaan program dan kegiatan di bidang sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anakn di Kabupaten Nunukan.

Nunukan, 20 Juli 2026
KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN NUNUKAN



FARIDAH ARYANI, SE.M.AP
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19681128 199103 2 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Sistematika Penulisan 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU 5

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD 5

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD 14

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD 16

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 17

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 30

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 30

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD 32

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 36

4.1 Program dan Kegiatan 36

BAB V PENUTUP 50

DAFTAR TABEL

2.1.1 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan.....7

2.1.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2027 Kabupaten Nunukan 11

2.2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan.....15

2.4.1 Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 Kabupaten Nunukan.....18

2 5.1 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2027 Kabupaten Nunukan 28

3.2.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan 33

4.1.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 36

4.1.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028 40

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan di bidang Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan bagian dari pembangunan nasional, sehingga perlu dilakukan secara terencana dan terpadu agar dapat diimplementasikan secara efektif,efisien dan tepat sasaran. Dan salah satu cara untuk mendukung pembangunan secara terencana adalah dengan menyusun rencana kerja (Renja) di tingkat SKPD, termasuk pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan menengah daerah, rencana pembangunan jangka menengah daearah dan rencana kerja pemerintah daerah, Dokumen Perencanaan OPD untuk periode 1 (Satu) Tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Jadi Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Renja DSP3A) Kabupaten Nunukan Tahun 2027 pada dasarnya memuat rencana kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027 dengan tetap memperhatikan ketersediaan sumber daya yang dimiliki.

Tahapan Penyusunan Rancangan Renja 2027 melalui serangkaian langkah sebagai berikut:

1. Pengolahan Data dan Informasi;
2. Menganalisis gambaran pelayanan OPD;
3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu berdasarkan Renstra OPD;
4. Perumusan Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD;
5. Telahaan terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2018;
6. Perumusan Tujuan dan Sasaran;
7. Penelahaan usulan program dan kegiatan dari masyarakat melalui musrembang tingkat kecamatan dan kabupaten, maupun masukan baik lisan maupun tertulis dari masyarakat;

8. Identifikasi kebijakan serta Program Nasional dan Provinsi Kalimantan Utara;
9. Perumusan program dan kegiatan prioritas;
10. Penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD;
11. Penyempurnaan rancangan Renja SKPD;
12. Pembahasan forum SKPD; dan
13. Pembangunan dokumen racangan Renja SKPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah serta kebijakan lainnya yang bersifat wajib dan atau urgen

- *Keterkaitan Renja DSP3A dengan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nunukan*

  Dokumen Renja DSP3A Kabupaten Nunukan Tahun 2027 adalah salah satu dokumen perencanaan SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan, yang memuat rencana pembangunan yang terkait urusan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah. Rencana program dan kegiatan yang terdapat dalam Renja DSP3A Tahun 2027 akan menjadi bahan penyusunan RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2027.

- *Keterkaitan Renja DSP3A dengan Rancangan Strategis (Renstra) DSP3A Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029*

  Penyusunan Renja DSP3A Kabupaten Nunukan Tahun 2027 berpedoman pada dokumen Renstra DSP3A Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029. Maka penyusunan Renja DPMPTSP Kabupaten Nunukan Tahun 2026 mengacu pada Rancangan Renstra DSP3A Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 yang telah diverifikasi oleh Tim Kabupaten.

- *Keterkaitan Renja DSP3A dengan Rancangan Strategis (Renstra) DSP3A Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029*

  Akumulasi dari pagu indikatif yang terdapat pada seluruh Renja SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2027 termasuk Renja DSP3A Kabupaten Nunukan Tahun 2027 akan menjadi bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2027.

Dokumen KUA-PPAS ini lah nantinya yang akan menjadi pedoman penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Nunukan Tahun 2027, dan yang teknis penyusunan menjadi tanggungjawab perangkat daerah masing-masing selaku perpanjangan tangan Pemerintah Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2027 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagai Kondisi Terpenuhinya Kebutuhan Material, Spiritual, dan Sosial Warga Negara agar dapat Hidup Layak dan Mampu Mengembangkan Diri;
3. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Mengatur Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Serta Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan Renja Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2024 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Masyarakat;
13. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan;
14. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 44 Tahun 2021 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2027 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang memuat program /kegiatan pembangunan selama 1 (satu) tahun sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, sehingga program/ kegiatan berjalan secara sistematis, efektif dan efisien selama Tahun Anggaran 2027.

Selain daripada itu penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2027 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan ini adalah untuk menjaga konsistensi antara program/ kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukanberdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukanyang telah disusun dengan kebijakan RPD Kabupaten Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029, meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan dan menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran.

Sedangkan tujuan disusunnya Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2027 adalah :

1. Untuk menyiapkan rancangan awal dari program dan kegiatan yang diusulkan serta merupakan jabaran dari Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan
2. Sebagai pedoman atau acuan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukandalam pelaksanaan program/ kegiatan selama Tahun 2027 sesuai dengan tugas dan fungsi, sehingga kegiatan yang dilaksanakan lebih terarah dan konsisten untuk mencapai tujuan dan sasaran yang lebih baik.
3. Menjamin Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan terutama dalam menjalankan kewenangannya dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pelaksanaan pembangunan daerah.

4. Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 2027 adalah untuk mendiskripsikan tentang program-program prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Program dan Kegiatan

BAB V : PENUTUP

BAB II

EVALUASI HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

a. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu adalah penjabaran Rencana Kerja tahunan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan sebagai Pelaksana Teknis Pembangunan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak . Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027 dan Peraturan Bupati Bupati Nomor 31 Tahun 2027 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027 untuk DPA-SKPD pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan jumlah pagu sebesar Rp.10.560.745.314,- dengan realisasi keuangan keadaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan sebesar 91,40% dengan realisasi anggaran belanja sebesar Rp. 9.652.681.430.86,-

b. Evaluasi Capaian Kinerja Renja

Review hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025 s.d 31 Desember 2025 dapat dilihat sebagai berikut :

a) Realisasi Program/ Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan yaitu:

- Program Pemberdayaan Sosial (91,70%)
    1. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) (97,52%)
    2. Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota (88,41%)
    3. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota (75,41%
- Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan (94.22%)
    1. Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik deberkasi didaerah kabupaten / Kota untuk dipulangkan ke desa / kelurahan asal (94,22%)

- Program Rehabilitasi Sosial (91,01%)
    1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial (90.48%)
    2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti (95.66%)
- Program Pelayanan Perlindungan Dan Jaminan Sosial (93.89%)
    1. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar (94,45%)
    2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota (93.89%)
- Program Penanganan Bencana (93.61%)
    1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota (93.61%)
- Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (98.50%)
    1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota (98.50%)
- Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/ Kota (90,35%)
    1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (98.07%)
    2. Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah (90.08%)
    3. Adminitrasi Umum Perangkat Daerah (94.11%)
    4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (86,67%)
    5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (97.86%)

b) Realisasi program/ kegiatan Fisik dan Non Fisik s.d 31 Desember 2025 pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Nunukan tercapai 91,40% Terealisasi sebesar Rp. 9.652.681.430.86,-

c) Faktor-Faktor terpenuhinya dan tidak terpenuhinya target kinerja program/ kegiatan disebabkan antara lain Capaian program tahun ini dipengaruhi oleh adanya peningkatan perhatian pada penanganan PPKS dan dukungan kerja sama dari berbagai pihak. Hal ini membantu kegiatan bisa berjalan lebih baik. Karena masih ada penyesuaian kebijakan dan koordinasi yang perlu waktu, beberapa target belum tercapai sepenuhnya. Harapannya, dengan perbaikan yang terus dilakukan, tahun 2027 hasilnya bisa lebih maksimal;

d) Implikasi terhadap pencapaian target capaian program/ kegiatan secara langsung terwujud dalam meningkatnya fungsi sosial dan peran kelompok sasaran dalam kegiatan pemberdayaan, yang turut berkontribusi pada upaya penurunan angka kemiskinan. Selain itu, potensi sumber daya kesejahteraan sosial di masyarakat juga semakin tergali dan dapat dimanfaatkan secara lebih optimal sebagai mitra dalam pembangunan kesejahteraan sosial;

e) Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab terhambatnya pelaksanaan program/ kegiatan tersebut antara lain Untuk mengatasi kendala pelaksanaan program, perlu dilakukan langkah perbaikan seperti penyesuaian anggaran apabila ada ketidaktepatan dalam pengusulan awal, termasuk opsi pergeseran anggaran agar kebutuhan program bisa tetap terpenuhi dan target yang direncanakan dapat dicapai dalam tahun berjalan.

Berikut Realisasi Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan s.d 31 Desember 2025 dalam Tabel dibawah ini :

Tabel 2.1.1

Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan s/d (31 Desember 2025)

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN		CAPAIAN (%)
			Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keuangan (%)
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA**	**100%**	**6.259.299.246**	**5.655.498.728**	**90,35%**
	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**7 Dokumen**	**142.901.700**	**140.145.546**	**98,07%**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	18.223.700	16.904.546	92,76%
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	124.678.000	123.241.000	98,85%
	Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	**1 Laporan**	**4.851.954.336**	**4.370.674.615**	**90,08%**
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	4.851.954.336	4.370.674.615	90,08%
	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	**36 Laporan**	**208.696.250**	**196.397.956**	**94,11%**
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8 Paket	112.930.000	102.776.063	91,01%
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4 Paket	25.552.450	24.786.340	86,38%
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2 Paket	8.929.800	7.785.540	87,19%
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	61.284.000	61.050.013	99,62%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**9 Laporan**	**758.394.960**	**657.292.161**	**86,67%**
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.500.000	4.000.000	88,89%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Laporan	90.000.000	73.294.394	72,44%
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Laporan	9.150.000	5.283.267	57,74%
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	654.744.960	574.714.500	87,78%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**23 Jenis**	**297.352.000**	**290.988.450**	**97,86%**
1	Penyediaan Jasa pemeliharaan ,biaya pemelihaan ,dan pajak kendaraan perorangan atau kendaraan dinas jabatan	10 Unit	42.352.000	38.026.450	89,79%
2	Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	255.000.000	252.962.000	99,20
II	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**100%**	**490.130.260**	**449.473.830**	**91,70%%**
	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	**10**	**358.923.740**	**350.030.570**	**97,52%**
1	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	10 Keluarga	358.923.740	350.030.570	97,52%

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN		CAPAIAN (%)
			Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keuangan (%)
	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**1 Dokumen**	**3.869.030**	**3.420.800**	**88,41**
1	Koordinasi dan Singkronisasi Penertiban Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1 Dokumen	3.869.030	3.420.800	88,41%
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	**36 Orang**	**127.337.490**	**96.022.460**	**75,41%**
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Orang	109.830.000	84.696.740	77,12%
2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	12.062.690	11.325.740	93,89 %
III	**Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasaan**	**100%**	**68.508.000**	**64.545.877**	**94,22%**
	Pemulangan warga Negara Migra Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di daerah Kabupaten /Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	**12 orang**	**68.508.000**	**64.545.877**	**94,22%**
1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak kekerasan dari Titik Debarkasi di daerah Kaabupaten/Kota untuk dipulangkah ke desa/kelurahan Asal	12 orang	68.508.000	64.545.877	94,22%
IV	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**80%**	**485.399.728**	**441.760.519,86**	**91,01%**
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut UsiaTerlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	**207 Orang**	**435.871.728**	**394.384.461,86**	**90,48%**
1	Penyediaan Permakanan	55 Orang	84.996.792	84.101.138	98,95%
2	Penyediaan Alat Bantu	5 orang	62.552.000	62.250.003,86	99,52%
3	Pemberian Pelayanaan Reunifikasi Keluarga	4 orang	67.342.266	66.414.425	98,62%
4	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nika dan Kartu Identitas Anak	20 Orang	40.090.000	35.020.000	87,35%
5	Pemberian Aksen ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	10 Orang	25.000.000	17.150.000	68,60%
6	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	50 Orang	5.232.670	4.952.960	94,65%
7	Pemberian Layanan Kedaruratan	60 Orang	63.450.000	62.950.000	99,21%
8	Pemberian layanan rujukan	2 Orang	87.208.000	61.545.935	70,57%
	Rehabilitas Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luarpanti Sosial	**11 Paket**	**49.528.000**	**47.376.058**	**95,66**

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN		CAPAIAN (%)
			Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keuangan (%)
1	Pemberian Layanan Rujukan	3 Orang	49.528.000	47.376.058	95,66
V	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**93%**	**2.643.685.530**	**90.562.005.596**	**67,88%**
	Pemeliharaan Anak-anak Terlantar	**30 Orang**	**12.833.158.900**	**12.621.382.640**	**98,35%**
1	Penjangkauan anak-anak terlantar	5 Orang	3.920.000	3.740.000	95,41%
2	Rujukan Anak - anak Terlantar	30 Orang	9.966.000	9.375.830	94,08%
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**16971 Keluarga**	**120.590.282.493**	**77.940.622.956**	**64,63%**
1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	27.626 Orang	291.335.130	196.770.568	67,54%
2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	5.714 Keluarga	24.482.200	13.033.080	53,23%
3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	5.714 Keluarga	2.262.868.200	2.207.326.548	97,55%
4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	30 Orang	65.000.000	65.000.000	100%
VI	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**100%**	**196.216.050**	**183.677.770**	**93,61%**
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	**100%**	**196.216.050**	**183.677.770**	
1	Penyediaan Makanan	5.987 Orang	52.763.650	52.706.270	99,89%
2	Penyediaan Sandang	5.987 Orang	73.120.000	73.111.500	99,99%
3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	5 Unit	35.000.000	34.465.000	98,47%
4	Penanganan Khusus bagi kelompok Rentah	60 Orang	10.294.000	0	0
5	Pelayanan Dukungan Psikososial	450 orang	25.038.400	23.395.000	93,44%
VII	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**80%**	**53.976.080**	**53.164.510**	**98,50%**
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	**0,67 Kawasan**	**53.976.080**	**53.164.510**	**98,50%**
1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Makam	53.976.080	53.164.510	98,50%
VIII	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDERDAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**0,4%**	**105.585.190**	**95.350.060**	**90,31%**
	pelembagaan pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah kewenangan Kabupaten/Kota	10 Perangkat Daerah	72.925.190	66.996.560	91,87%
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	1 Dokumen	40.151.840	36.757.460	91,55%
2	Advokasi Kebijakan dan PndampinganPelaksanaan PUG termasuk PPRG	50 Perangkat Daerah	32.773.350	30.239.100	92,27%

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN		CAPAIAN (%)
			Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keuangan (%)
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	**6 Lembaga**	**32.660.000**	**28.353.500**	**86,81**
1	Peningkatan Kapasita sumber Daya Lembaga Penyediaan Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	25 Orang	32.660.000	28.353.500	86,81
IX	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**2 Rasio**	**37.762.550**	**29.897.010**	**79,17**
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten /Kota	5 Orang	13.094.050	10.522.010	80,36
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan , program dan kegiatan pecegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup kabupaten /kota	1 Dokumen	13.094.050	10.522.010	80,36
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	**5 orang**	**24.668.500**	**19.375.000**	**78,54**
1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	24.668.500	19.375.000	78,54
X	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**46 Persen**	**62.657.800**	**61.510.390**	**98,17**
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender(KG) dan Hak anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**50 Keluarga**	**62.657.800**	**61.510.390**	**98,17**
	Pengembangan Kegiataan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluargan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Keluarga	62.657.800	61.510.390	98,17
XI	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**60 Persen**	**56.722.450**	**55.141.000**	**97,21**
	Pengumpulan, Pengelolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupate/Kota	10 SKPD	56.722.450	55.141.000	97,21
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupate/Kota	1 Dokumen	56.722.450	55.141.000	97,21
	PROGRAM PENEMUAN HAK ANAK (PHA)	**9,52 persen**	**49.247.360**	**38.511.235**	**78,20**
	pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah,Non Pemerintah dan Dunia Usaha kewenangan Kabupaten/Kota	**2 Organisasi**	**23.288.760**	**21.502.480**	**92,33**
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penemuan Hak Anak Pada lembaga Pemerintah ,Non Pemerintah ,Media dan Dunia usaha Kewenangan Kabupaten/kota	2 Organisasi	23.288.760	21.502.480	92,33
	Peguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup anak Kewenangan Kabupaten /Kota	**2 Lembaga**	**25.958.600**	**17.008.755**	**65,52**
	PengembanganKomunikasi,informasi dan Edukasi Penemuahan hakHak anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ kota	1 Dokumen	25.958.600	17.008.755	65,52%

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN		CAPAIAN (%)
			Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keuangan (%)
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	**3 Rasio**	**37.669.070**	**28.904.475**	**76,73**
	Penyedian Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/kota	**10 Anak**	**19.835.250**	**12.830.000**	**64,68**
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang memerlukan perlindungan Khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota	10 Orang	19.835.250	12.830.000	64,68
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlikan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**1 Dokumen**	**17.833.820**	**16.074.475**	**90,13**
	Pengembangan KIE (Komunikasi ,Informasi dan Edukasi) Perlindungan Khusus Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	17.833.820	16.074.475	90,13
			10.560.745.314	**9.652.681.430,86**	**91,40%**

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2025, dapat dilihat sebagaimana table berikut :

Tabel 2.1.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2029 Kabupaten Nunukan

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Output)	Target kinerja capaian program (Renstra PD) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (renja Perangkat Daerah Tahun 2027)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun (n-2) 2025	Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2) (2025)	Capaian (n-2) (2025)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**									
1.06.02	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya (%)**	**100%**	**75%**	**100%**	**70,73%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
2.08.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)**	**25 Dokumen**	**2Dokumen**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**100%**	**5 Dokumen**	**2 Dokumen**	**8%**
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	**5 Laporan**	**5 Laporan**	**5 Laporan**	**5 Laporan**	**100%**	**1 Laporan**	**7 Laporan**	**140%**
2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25 Dokumen	2 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	2 Dokumen	8%
2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5 Laporan	5 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100%	1 Laporan	7 Laporan	140%
2.08.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu**	**60 Bln**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**	**12 Bulan**	**18 Bulan**	**30 %**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Output)	Target kinerja capaian program (Renstra PD) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (renja Perangkat Daerah Tahun 2027)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun (n-2) 2025	Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2) (2025)	Capaian (n-2) (2025)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN (Orang/bulan)	60 Bln	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	18 Bulan	30 %
2.08.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**5 Laporan**	**2 Dok**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**100%**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**40 %**
2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	100%	1 Paket	9 Paket	180 %
2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	1 Paket	2 Paket	40%
2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	1 Paket	0 Paket	40%
2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	2 Laporan	40 %
2.08.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah jenis barang milik daerah Penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan**	**25 Unit**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5 Unit**	**-**	**0%**
1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 unit	-	-	-	-	5 unit	-	0%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Output)	Target kinerja capaian program (Renstra PD) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (renja Perangkat Daerah Tahun 2027)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun (n-2) 2025	Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2) (2025)	Capaian (n-2) (2025)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.08.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang tersedia**	**20 Laporan**	**6 Laporan**	**6 Laporan**	**2 Laporan**	**33,33%**	**4 Laporan**	**13 Laporan**	**65%**
2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	5 Laporan	1 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	1 Laporan	2 Laporan	40%
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	5 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	3 Laporan	75%	1 Laporan	5 Laporan	100%
2.08.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kanttor yang disediakan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	1 Laporan	5 Laporan	100%
2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	5 Laporan	12 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	20%
2.08.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**20 Unit**	**11 Unit**	**3 unit**	**3 unit**	**100%**	**4 unit**	**8 unit**	**40%**
2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan gajinya	20 Unit	10 Unit	10 Unit	5 Unit	50%	4 Unit	7 Unit	35 %
2.08.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana geung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	20%
1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase PSKS yang meningkat kapasitas dan perannya dalam penanganan PPKS**								
1.06.02.2.01	**Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)**	**Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)**	**60 Keluarga**	**10 Keluarga**	**10 Keluarga**	**56 Keluarga**	**560%**	**10 Keluarga**	**56 Keluarga**	**93,3%**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Output)	Target kinerja capaian program (Renstra PD) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (renja Perangkat Daerah Tahun 2027)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun (n-2) 2025	Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2) (2025)	Capaian (n-2) (2025)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.06.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	60 Keluarga	10 Keluarga	10 Keluarga	56 Keluarga	560%	10 Keluarga	112 Keluarga	93,3%
1.06.02.2.02	**Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)**	**5 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**100%**	**1 Dokumen**	**2 Dokumen**	**40%**
1.06.02.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	40%
1.06.02.2.03	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase PSKS yang meningkat kapasitas dan perannya dalam penanganan PPKS**	**6 paket**	**3 Paket**	**3 paket**	**3 paket**	**100%**	**6 paket**	**6 paket**	**100%**
1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	30 Keluarga	10 Keluarga	10 Keluarga	-	-	10 Keluarga	-	-
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	25 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga	100%	6 Lembaga	7 Lembaga	28%
1.06.02.2.03.0013	Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesos desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi (Lembaga)	5 Lembaga	-	-	-	-	1 Lembaga	-	0%
1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	14 Orang	-	-	-	-	12 Orang	-	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Output)	Target kinerja capaian program (Renstra PD) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (renja Perangkat Daerah Tahun 2027)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun (n-2) 2025	Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2) (2025)	Capaian (n-2) (2025)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.06.03	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (Persentase)**	**500%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**70 jenis**	**70 jenis**	**100%**
1.06.03.2.01	**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal**	**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asa**	**26 Orang**	**6 Orang**	**12 Orang**	**30 Orang**	**250%**	**12 Orang**	**-**	**-**
1.06.03.2.01.0003	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	26 Orang	6 Orang	12 Orang	30 Orang	250%	12 Orang	-	-
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase Pelayanan Rehabilitasi PPKS (%)**	**90%**	**18,88%**	**-**					
1.06.04.2.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Persentase PPKS yang mendapatkan layanan Rehabilitasi**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	502 Orang	14 Orang	60 Orang	60 Orang	100%	65 Orang	88 Orang	17,52
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	110 Orang	-	-	-	-	-	-	-
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	101 Orang	11 Orang	19 Orang	23 Orang	209%	20 Orang	23 Orang	22,72%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Output)	Target kinerja capaian program (Renstra PD) Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (renja Perangkat Daerah Tahun 2027)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun (n-2) 2025	Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2) (2025)	Capaian (n-2) (2025)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	62 orang	7 Orang	4 Orang	7 orang	175%	20 Orang	9 Orang	14,52%
1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	275 Orang	151 Orang	55 Orang	151 Orang	274 %	55 Orang	284 Orang	103,2%
1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	310 Orang	36 Orang	60 Orang	151 Orang	251,6%	60 Orang	184 Orang	59,35%
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	39 Orang	15 Orang	2 Orang	15 Orang	750%	0 Orang	20 Orang	51,2%
1.06.04.2.01.0014	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	110 orang	29 Orang	20 orang	30 Orang	150%	25 Orang	30 Orang	27,27%
1.06.04.2.02	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)**	**75%**							
		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	**83 orang**							
1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	28 Orang	10 Orang	16 orang	7 orang	43,75%	15 orang	9 orang	32,14%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Output)	Target kinerja capaian program (Renstra PD) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (renja Perangkat Daerah Tahun 2027)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun (n-2) 2025	Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2) (2025)	Capaian (n-2) (2025)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	83 orang	15 Orang	3 orang	8 orang	266%	-	8 orang	9,6 %
1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase Anak Terlantar dan Fakir Miskin yang Ditangani (%)**	**100%**							
1.06.05.2.01	**Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**	**Persentase fakir miskin dan anak terlantar yang terdata dan mendapatkan akses perlindungan dan jaminan sosial**	**100%**							
1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	30 orang	2 Orang	30 orang	4 orang	13,3%	-	4 orang	13,3%
1.06.05.2.01.0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10 orang	5 Orang	5 orang	-	-	-	5 orang	50 %
1.06.05.2.01.0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	20 orang	-	-	-	-	-	-	-
1.06.05.2.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)**	**22.560 orang**							
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	22.560 orang	19.848 orang	27.626 orang	37.024 orang	134%	1.325 Orang	21,173 Orang	93,8%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Output)	Target kinerja capaian program (Renstra PD) Tahun 2025-2029	Realisasi Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (renja Perangkat Daerah Tahun 2027)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun (n-2) 2025	Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2) (2025)	Capaian (n-2) (2025)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	36 orang	4 orang	30 orang	13 Orang	43,33%	6 orang	13 orang	36,11 %
1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	25.250 Orang	5050 orang	6091 Orang	7.523 Orang	123%	5050 Orang	7523 Orang	29,79%
1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	22. 560 Keluarga	2.047 Keluarga	5.714 Keluarga	4.775 keluarga	83,57%	4.512 keluarga	4.775 keluarga	21,16%
1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Meningkatya Perlindungan Sosial Korban Bencana (%)**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
1.06.06.2.01	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)**								
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	7500 orang	28 Orang	5.987 orang	414 orang	6,9%	1500 orang	414 orang	5,52 %
1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang	7.500 orang	361 orang	5987 orang	361 orang	6,02 %	1500 orang	361 orang	4,81%
1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	325 orang	10 Orang	65 orang	3 orang	4,61%	65 orang	3 orang	0.92%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Output)	Target kinerja capaian program (Renstra PD) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (renja Perangkat Daerah Tahun 2027)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun (n-2) 2025	Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2) (2025)	Capaian (n-2) (2025)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	700 orang	38 orang	495 orang	394 orang	79,6%	140 orang	432 orang	61,71%
1.06.06.2.01.0007	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	20 orang	1 unit	5 unit	1 unit orang	20%	4 orang	2 unit	-
1.06.06.2.02	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung)**								
1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung)	10 Kampung	-	-	-	-	2 Kampung	-	-
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	30 Orang	-	-	-	-	-	-	-
1.06.06.2.02.0003	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda	Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	100 orang	-	-	-	-	20 orang	-	-
1.06.07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Cakupan TMP yang terpelihara (%)**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
1.06.07.2.01	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Dokumen)**	**5 Dokumen**							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Output)	Target kinerja capaian program (Renstra PD) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (renja Perangkat Daerah Tahun 2027)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun (n-2) 2025	Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2) (2025)	Capaian (n-2) (2025)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Dokumen)	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	-	-
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam)	5 Makam	1 Makam	1 Makam	1 Makam	100%	1 makam	1 makam	20%
1.06.07.2.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Laporan)	60 laporan	-	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	1,6 %
2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)**	**2,43 %**	**2,43%**	**1,05%**	**1,05%**	**100%**	**2,44 %**		
2.08.02.2.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)**	**50 Lembaga**	**15 Lembaga**	**20 Perangkat Daerah**	**25 Perang Daerah**	**125 %**	**-**	**30 Perangkat Daerah**	**60%**
2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Laporan	2 Dokumen	40%
2.08.02.2.01.0013	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	50 Perangkat Daerah	-	50 Perangkat Daerah	25 Perangkat Daerah	50%	50 Lembaga	40 Lembaga	80%
2.08.02.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek (orang)**	**30 Lembaga**	**6Lemabaga**	**7 Lembaga**	**6 Lembaga**	**85,71%**	**-**	**14 Lembaga**	**46,6%**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Output)	Target kinerja capaian program (Renstra PD) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (renja Perangkat Daerah Tahun 2027)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun (n-2) 2025	Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2) (2025)	Capaian (n-2) (2025)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.08.02.2.03.0007	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	30 Lembaga	-	-	-	-			
2.08.02.2.03.0010	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek (orang)	150 orang	-	-	-	-	-	-	-
2.08.02.2.03.0015	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-	-	-	-	-	25 Orang	-	-
2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO per 10.000 Penduduk Perempuan (Rasio)**								
2.08.03.2.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)**	**25 Orang**	**6 orang**						
2.08.03.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	25 Orang	6 Orang	-	-	-	-	2 orang	8%
2.08.03.2.02.0014	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kab/Kota	-	-	-	-	-	4 orang	-	-
2.08.03.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (orang)**	**175 orang**							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Output)	Target kinerja capaian program (Renstra PD) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Program dan Kegiatan (renja Perangkat Daerah Tahun 2027	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun (n-2) 2025	Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2) (2025)	Capaian (n-2) (2025)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.08.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (orang)	175 orang	-	-	-	-	-	25 orang	14,2 %
2.08.03.2.03.0011	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-	-	-	-	-	50 orang	-	-
2.08.04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Tingkat Partisipasi Aggkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)**								
2.08.04.2.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas (Lembaga)**	**25 Lembaga**							
2.08.04.2.02.0007	peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas (Lembaga)	25 Lembaga	-	-	-	-	5 lembaga	5 Lembaga	20%
2.08.05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan data Gender dan Anak Sebagai Dasar Perencanaan Pembangunan (%)**								
2.08.05.2.01	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)**	**5 Dokumen**							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Output)	Target kinerja capaian program (Renstra PD) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Program dan Kegiatan (renja Perangkat Daerah Tahun 2027	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun (n-2) 2025	Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2) (2025)	Capaian (n-2) (2025)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.08.05.2.01.0003	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	5 Dokumen	1 Dokumen	15 Dokumen	1 Dokumen	6,67%	1 Dokumen	1 Dokumen	20%
2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Persentase Kecamatan Layak Anak (%)**	**100 %**							
2.08.06.2.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)**	**10 Lembaga**							
2.08.06.2.01.0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	10 Lembaga	-	-	-	-	2 Lembaga	-	-
2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Rasio Kekerasan Terhadap Anak termasuk (per 10.000 anak) (Rasio)**	**40**							
2.08.07.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**umlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota (Dokumen)**	**5 Dokumen**							
2.08.07.2.01.0006	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota (Dokumen)	5 Dokumen	-	-	-	-	-	1 Dokumen	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Output)	Target kinerja capaian program (Renstra PD) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Program dan Kegiatan (renja Perangkat Daerah Tahun 2027	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun (n-2) 2025	Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2) (2025)	Capaian (n-2) (2025)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.08.07.2.01.0012	Kerjasama pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Kerjasama yang melibatkan para pihak baik pemerintah maupun lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dalam pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) di tingkat Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-
2.08.07.2.02	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Kab/Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
2.08.07.2.02.0017	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	-	-	-	-	-	10 Orang	-	-
2.08.07.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)**	**5 orang**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.08.07.2.03.0013	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	5 orang	-	-	-	-	-	-	-
2.08.07.2.03.0016	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-	-	-	-	-	2 Orang	-	-
2.08.07.2.03.0017	Kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menganalisis kinerja pelayanan yang diselenggarakan oleh suatu organisasi tentunya organisasi tersebut memerlukan suatu ukuran yang dijadikan tolok ukur guna mengukur tingkat capaian kinerja. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Nunukan sebagai penyelenggara pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial dan Pemberdayaan Perempuan telah memiliki tolak ukur yang jelas yang digunakan dalam mengukur tingkat capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Nunukan, adapun ukuran yang digunakan adalah Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan.

Periode Renstra 2025-2029 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukanmendukung misi ke dua pada RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu "***Membangun Perekonomian Daerah yang Produktif, Berkelanjutan dan Berkeadilan***" dari penjabaran isu strategis Program Kepala Daerah dituangkan dalam satu tujuan tiga sasaran yang sudah dituangkan dalam Renstra tahun 2025-2029 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Nunukan sebagai berikut :

1. Tujuan :

Menguatnya Pelindungan dan Pemberdayaan Sosial Kelompok Rentan

- Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks)
- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Indeks)

2. Sasaran

a. Meningkatnya Penanganan dan Pemberdayaan Sosial PPKS

- Indikator Sasaran 1 :

  Persentase PPKS yang mendapatkan Pemberdayaan Sosial (%)

  Persentase PPKS yang mendapatkan Penanganan Rehabilitasi Sosial (%)

  Persentase PPKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial (%)

b. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan

- Indikator Sasaran 2 :

  Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (%)

  Persentase Pelayanan dan Pendampingan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (%)

c. Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah

- Indikator Sasaran 3 :

  Predikat Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)

Berikut diuraikan Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukansebagai tabel berikut:

Tabel 2.2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan	Target SPM/IKU/IKK atau indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Analisa
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	90%	100%	100%	100%	
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	100%	100%	100%	
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Pengemis diluar Panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Perlindungan dan Jaminan saat tanggap dan paska bencana korban bencana kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	91%	91%	100%	100%	100%	
6	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya diluar Panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Presentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1.	1.06.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
2.	Persentase PPKS yang mendapatkan Pemberdayaan Sosial	%	40	43	46	49	52	55	58	
3.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	84,14	84,49	84,50	84,52	84,53	84,53	84,55	
4.	Persentase PPKS yang mendapatkan penanganan Rehabilitasi Sosial	%	94	95	96	97	98	99	99,1	
5.	Persentase Pelayanan dan Pendampingan Kekerasan Terhadap PerempuanÂ danÂ Anak	%	0	50	51	52	53	54	55	
6.	Persentase PPKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	75	76	77	78	79	80	81	

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1.	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
2.	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	positif	%	93,18	94	95	96	97	98	100	
3.	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana		Persentase	17,80	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	positif	%	100	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	
5.	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial	positif	Persentase	25	30	30	30	35	40	50	
6.	Persentase penanganan tanggap bencana darurat		%	15	30	30	50	50	50	50	
7.	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	positif	%	98,46	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	
8.	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	positif	%	98,33	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	100	
9.	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
10.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)		Indeks	0,362	0,359	0,348	0,337	0,326	0,315	0,304	
11.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		Indeks	83,97	85,20	85,76	86,32	86,88	87,44	88,00	
12.	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif		Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
13.	Persentase ARG Daerah		%	2,41	2,42	2,43	2,44	2,45	2,46	2,46	
14.	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif		%	100	100	100	100	100	100	100	

2.3 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 44 Tahun 2021. tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Nunukan mempunyai pokok dan fungsi melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Sosial dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kab. Nunukan.

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan dalam pelaksanaan terdapat beberapa permasalahan yang menjadikan isu penting dalam penanganan kemiskinan dan pelayanan pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) ada beberapa hal :

1. Belum tersedianya Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang akurat. Untuk menentukan jumlah sasaran pembangunan kesejahteraan sosial perlu adanya data yang valid agar meminimalisir kesalahan dalam penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran
2. Masih tingginya masalah sosial masyarakat yang belum tertangani
3. Tingkat kemiskinan yang masih tinggi dan menjadi permasalahan sosial didaerah dan nasional
4. Kurangnya akurasi data PPKS dan kemiskinan
5. Rendahnya pemahaman PSKS dalam penanganan PPKS
6. Rendahnya Daya dukung sarana/ prasarana

Selain adanya permasalahan utama tersebut terdapat permasalahan secara teknis dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat teknis, permasalahan tersebut diantaranya :

a. Kurang memadainya sarana dan prasarana dalam penanganan PPKS
b. Belum adanya penampungan dan tempat sebagai sarana pembinaan pada PPKS.
c. Regulasi yang kurang sesuai untuk diterapkan dalam pencairan bansos.
d. Kurang tenaga yang memadai untuk menangani PPKS.

Sebagai tindak lanjut kedepan supaya kendala dan hambatan ini dapat diminimalisir, maka target yang harus dilakukan pada tahun 2027 adalah :

1. Mengusulkan sarana dan prasaran untuk penanganan PPKS yang terlantar
2. Meningkatkan koordinasi perangkat daerah tentang penanganan PPKS
3. Mengusulkan Regulasi yang mudah untuk dilaksanakan dalam penyaluran bansos pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
4. Kuatnya komitmen pemerintah daerah dalam hal perlindungan dan jaminan sosial.

2.4 Review terhadap RKPD

Dalam rancangan RKPD terdapat program prioritas dalam pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial yang telah dibandingkan dengan capaian pelaksanaan tahun lalu dan diharapkan dengan adanya dukungan dari Pemerintah Daerah dapat mengentaskan atau pengurangan tingkat kemiskinan. dan Proses penyusunan Rancangan RKPD dilakukan analisa kebutuhan terhadap masing-masing Bidang sehingga didapat usulan kegiatan yang sesuai dengan kewenangan.

Telaahan terhadap rancangan RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program/ kegiatan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukandan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan, Rivew ini meliputi kegiatan identifikasi prioritas program/ kegiatan, indikator kinerja program/ kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/ kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/ kegiatan. Dalam review ini tidak terdapat perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan Renstra dan Renja tahun 2027, sebagaimana penjelasan pada tabel berikut :

Tabel 4.1.2 RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NUNUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. NUNUKAN
TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NUNUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						**9.912.379.362,92**								**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.423.872.558,00**								**0,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**2.423.872.558,00**								**0,00**	
1.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**						**535.498.065,00**								**0,00**	
		Meningkatnya pemberdayaan sosial						***535.498.065,00***								***0,00***	
			999.Persentase Masyarakat Adat Terpencil yang Meningkat Pendapatannya	30 %		10 %	15 %	535.498.065,00							20 %	0,00	
			999.Persentase Sumber daya Kesejahteraan yang Diberdayakan	100 %		100 %	100 %	535.498.065,00							100 %	0,00	
	1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)						240.941.890,00						-		0,00	
		Jumlah KAT yang diberdayakan						240.941.890,00						-		0,00	
			Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	14 Keluarga		10 Keluarga	11 Keluarga	240.941.890,00							12 Keluarga	0,00	
	1.06.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT						240.941.890,00			-	-	Peningkatan Perlindungan Sosial dan pelestarian Budaya			0,00	
		Terpenuhinya Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	14 Keluarga		10 Keluarga	10 Keluarga	240.941.890,00	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Keluarga	0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NUNUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota						6.942.040,00						-		0,00	
		Jumlah rekomendasi Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang yang diterbitkan						6.942.040,00						-		0,00	

			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.942.040,00							1 Dokumen	0,00	
	1.06.02.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang						6.942.040,00			-	-	Peningkatan Perlindungan Sosial dan pelestarian Budaya			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaran Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.942.040,00	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NUNUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota						287.614.135,00						-		0,00	
		Jumlah PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan PPKS						287.614.135,00						-		0,00	
			Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Keluarga		3 Keluarga	3 Keluarga	0,00							4 Keluarga	0,00	
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Lembaga		5 Lembaga	5 Lembaga	16.970.000,00							5 Lembaga	0,00	
			Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	5 Orang		3 Orang	3 Orang	74.845.910,00							4 Orang	0,00	
			Jumlah Puskesos desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi	1 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	195.798.225,00							1 Lembaga	0,00	
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota						0,00			-	-	Peningkatan Perlindungan Sosial dan pelestarian Budaya			0,00	
		Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Keluarga		3 Keluarga	10 Keluarga	0,00	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Keluarga	0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NUNUKAN, PEMBERDAYAAN

																	PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota						16.970.000,00			-	-	Peningkatan Perlindungan Sosial dan pelestarian Budaya			0,00	
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Lembaga		5 Lembaga	6 Lembaga	16.970.000,00	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5 Lembaga	0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NUNUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.06.02.2.03.0013	Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kewenangan Kabupaten/Kota						195.798.225,00			-	-	Peningkatan Perlindungan Sosial dan pelestarian Budaya			0,00	
		Meningkatnya peran Puskesos sebagai layanan sosial satu pintu dan hub program graduasi	Jumlah Puskesos desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi	1 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	195.798.225,00	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Lembaga	0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NUNUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota						74.845.910,00			-	-	Peningkatan Perlindungan Sosial dan pelestarian Budaya			0,00	
		Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	5 Orang		3 Orang	12 Orang	74.845.910,00	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Orang	0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NUNUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

		Jumlah PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan PPKS						287.614.135,00						-		0,00	
			Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	-		-	-	0,00							-	0,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	-		-	-	0,00							-	0,00	
	1.06.02.2.03.0015	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi						0,00			-	-	Peningkatan Perlindungan Sosial dan pelestarian Budaya			0,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	-		-	10 Orang	0,00	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NUNUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0017	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota						0,00			-	-	Peningkatan Perlindungan Sosial dan pelestarian Budaya			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	-		-	10 orang	0,00	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NUNUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**1.06.03**	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**						**50.000.000,00**								**0,00**	
		Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan						***50.000.000,00***								***0,00***	

			999.Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	50.000.000,00							50 Persentase	0,00	
	1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal						50.000.000,00						-		0,00	
		Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani						50.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang		3 Orang	3 Orang	50.000.000,00							4 Orang	0,00	
	1.06.03.2.01.0003	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal						50.000.000,00			-	-	Peningkatan Perlindungan Sosial dan pelestarian Budaya			0,00	
		Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang		3 Orang	20 Orang	50.000.000,00	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Orang	0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NUNUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**						**820.424.280,00**								**0,00**	
		Meningkatnya rehabilitasi sosial						***790.424.280,00***								***0,00***	
			999.Persentase Pelayanan Rehabilitasi PPKS	100 %		90 %	95 %	790.424.280,00							95 %	0,00	
		Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Nafza diluar panti sosial yang memperoleh Rehabilitasi Sosial						575.424.280,00						-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Orang		7 Orang	7 Orang	100.000.000,00							8 Orang	0,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	13 Orang		12 Orang	12 Orang	30.000.000,00							13 Orang	0,00	

			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	23 Orang		19 Orang	20 Orang	69.872.000,00							21 Orang	0,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	55 Orang		55 Orang	55 Orang	26.597.280,00							55 Orang	0,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	64 Orang		60 Orang	60 Orang	223.970.000,00							62 Orang	0,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang		60 Orang	65 Orang	94.985.000,00							70 Orang	0,00	
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Orang		20 Orang	21 Orang	30.000.000,00							22 Orang	0,00	
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan						94.985.000,00			-	-	Peningkatan Perlindungan Sosial dan pelestarian Budaya			0,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang		60 Orang	65 Orang	94.985.000,00	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					70 Orang	0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NUNUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu						69.872.000,00			-	-	Peningkatan Perlindungan Sosial dan pelestarian Budaya			0,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	23 Orang		19 Orang	20 Orang	69.872.000,00	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					21 Orang	0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NUNUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar						30.000.000,00			-	-	Peningkatan Perlindungan Sosial dan pelestarian Budaya			0,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	13 Orang		12 Orang	20 Orang	30.000.000,00	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					13 Orang	0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NUNUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan						26.597.280,00			-	-	Peningkatan Perlindungan Sosial dan pelestarian Budaya			0,00	
		Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	55 Orang		55 Orang	150 Orang	26.597.280,00	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					55 Orang	0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NUNUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan						223.970.000,00			-	-	Peningkatan Perlindungan Sosial dan pelestarian Budaya			0,00	
		Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	64 Orang		60 Orang	40 Orang	223.970.000,00	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					62 Orang	0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NUNUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan						100.000.000,00			-	-	Peningkatan Perlindungan Sosial dan pelestarian Budaya			0,00	
		Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Orang		7 Orang	0 Orang	100.000.000,00	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					8 Orang	0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NUNUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

	1.06.04.2.01.0014	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota						30.000.000,00			-	-	Peningkatan Perlindungan Sosial dan pelestarian Budaya			0,00	
		Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Orang		20 Orang	25 Orang	30.000.000,00	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					22 Orang	0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NUNUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial						245.000.000,00						-		0,00	
		Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Nafza diluar panti sosial yang memperoleh Rehabilitasi Sosial						245.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Orang		5 Orang	5 Orang	120.000.000,00							6 Orang	0,00	
	1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga						120.000.000,00			-	-	Peningkatan Perlindungan Sosial dan pelestarian Budaya			0,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Orang		5 Orang	7 Orang	120.000.000,00	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6 Orang	0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NUNUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						575.424.280,00						-		0,00	
		Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Nafza diluar panti sosial yang memperoleh Rehabilitasi Sosial						575.424.280,00						-		0,00	

			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	0,00							-	0,00	
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga						0,00			-	-	Peningkatan Perlindungan Sosial dan pelestarian Budaya			0,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	15 Orang	0,00	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NUNUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Nafza diluar panti sosial yang memperoleh Rehabilitasi Sosial						245.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	125.000.000,00							-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang						125.000.000,00			-	-	Peningkatan Perlindungan Sosial dan pelestarian Budaya			0,00	
		Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	25 Orang	125.000.000,00	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NUNUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**						**532.792.455,00**								**0,00**	
		Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial Masyarkat Rentan						***532.792.455,00***								***0,00***	
			999.Persentase Anak Terlantar dan Fakir Miskin yang Ditangani	100 %		100 %	100 %	532.792.455,00							100 %	0,00	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						532.792.455,00						-		0,00	
		Jumlah data fakir miskin yang valid						532.792.455,00						-		0,00	

			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	4512 Orang		4512 Orang	4512 Orang	336.210.755,00							4512 Orang	0,00	
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Orang		6 Orang	6 Orang	50.590.000,00							6 Orang	0,00	
			Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5050 Orang		5050 Orang	5050 Orang	50.025.200,00							5050 Orang	0,00	
			Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	4512 Usulan		4512 Usulan	4512 Usulan	95.966.500,00							4512 Usulan	0,00	
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						336.210.755,00			-	-	Peningkatan Perlindungan Sosial dan pelestarian Budaya			0,00	
		Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	4512 Orang		4512 Orang	1325 Orang	336.210.755,00	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4512 Orang	0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NUNUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat						50.590.000,00			-	-	Peningkatan Perlindungan Sosial dan pelestarian Budaya			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Orang		6 Orang	6 Orang	50.590.000,00	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6 Orang	0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NUNUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga						50.025.200,00			-	-	Peningkatan Perlindungan Sosial dan pelestarian Budaya			0,00	

		Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5050 Orang		5050 Orang	5050 Orang	50.025.200,00	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5050 Orang	0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NUNUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						95.966.500,00			-	-	Peningkatan Perlindungan Sosial dan pelestarian Budaya			0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	4512 Usulan		4512 Usulan	4512 Usulan	95.966.500,00	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4512 Usulan	0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NUNUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**						**434.221.088,00**								**0,00**	
		Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana						***434.221.088,00***								***0,00***	
			999.Meningkatya Perlindungan Sosial Korban Bencana	100 %		100 %	100 %	434.221.088,00							100 %	0,00	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota						371.093.358,00						-		0,00	
		Jumlah korban bencana alam dan Sosial yang ditangani						371.093.358,00						-		0,00	
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	140 Orang		140 Orang	140 Orang	48.190.000,00							140 Orang	0,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1500 Orang		1500 Orang	1500 Orang	99.994.000,00							1500 Orang	0,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	65 Orang		65 Orang	65 Orang	58.540.000,00							65 Orang	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1500 Orang		1500 Orang	1500 Orang	99.994.608,00							1500 Orang	0,00	
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang		4 Orang	4 Orang	64.374.750,00							4 Orang	0,00	
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan						99.994.608,00			-	-	Peningkatan Perlindungan Sosial dan pelestarian Budaya			0,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1500 Orang		1500 Orang	1500 Orang	99.994.608,00	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1500 Orang	0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NUNUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang						99.994.000,00			-	-	Peningkatan Perlindungan Sosial dan pelestarian Budaya			0,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1500 Orang		1500 Orang	1500 Orang	99.994.000,00	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1500 Orang	0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NUNUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan						58.540.000,00			-	-	Peningkatan Perlindungan Sosial dan pelestarian Budaya			0,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	65 Orang		65 Orang	65 Orang	58.540.000,00	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					65 Orang	0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NUNUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial						48.190.000,00			-	-	Peningkatan Perlindungan Sosial dan pelestarian Budaya			0,00	
		Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	140 Orang		140 Orang	140 Orang	48.190.000,00	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					140 Orang	0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NUNUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.06.06.2.01.0007	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi						64.374.750,00			-	-	Peningkatan Perlindungan Sosial dan pelestarian Budaya			0,00	
		Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang		4 Orang	4 Orang	64.374.750,00	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Orang	0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NUNUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota						63.127.730,00						-		0,00	
		Jumlah Kampung Siaga Bencana yang di selenggarakan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kewenangan Kab/Kota						63.127.730,00						-		0,00	
			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Kampung		2 Kampung	2 Kampung	21.480.230,00							2 Kampung	0,00	
			Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya	20 Orang		20 Orang	20 Orang	20.002.000,00							20 Orang	0,00	
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana						21.480.230,00			-	-	Peningkatan Perlindungan Sosial dan pelestarian Budaya			0,00	

		Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Kampung		2 Kampung	2 Kampung	21.480.230,00	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Kampung	0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NUNUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.02.0003	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda						20.002.000,00			-	-	Peningkatan Perlindungan Sosial dan pelestarian Budaya			0,00	
		Tersedianya Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya	Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya	20 Orang		20 Orang	20 Orang	20.002.000,00	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					20 Orang	0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NUNUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Jumlah Kampung Siaga Bencana yang di selenggarakan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kewenangan Kab/Kota						63.127.730,00						-		0,00	
			Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	-		-	-	21.645.500,00							-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.06.06.2.02.0006	Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana						21.645.500,00			-	-	Peningkatan Perlindungan Sosial dan pelestarian Budaya			0,00	
		Meningkatnya Kompetensi Tagana Dalam Penanganan Bencana	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	-		-	6 Orang	21.645.500,00	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NUNUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**						**50.936.670,00**								**0,00**	
		Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan						***50.936.670,00***								***0,00***	
			999.Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Cakupan TMP yang terpelihara	100 %		100 %	100 %	50.936.670,00							100 %	0,00	

	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						50.936.670,00						-		0,00	
		Jumlah Kawasan Taman Makam Pahlawan yang dipelihara						50.936.670,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	44.000,00							1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	34.920.000,00							12 Laporan	0,00	
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam		1 Makam	1 Makam	15.972.670,00							1 Makam	0,00	
	1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						44.000,00			-	-	Peningkatan Perlindungan Sosial dan pelestarian Budaya			0,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	44.000,00	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NUNUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						15.972.670,00			-	-	Peningkatan Perlindungan Sosial dan pelestarian Budaya			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam		1 Makam	1 Makam	15.972.670,00	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Makam	0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NUNUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.07.2.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						34.920.000,00			-	-	Peningkatan Perlindungan Sosial dan pelestarian Budaya			0,00	

		Terlaksananya Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	12 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	34.920.000,00	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NUNUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**7.488.506.804,92**								**0,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**7.488.506.804,92**								**0,00**	
7.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**6.316.022.224,92**								**0,00**	
		Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD						***6.316.022.224,92***								***0,00***	
			999.Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya	100 %		100 %	100 %	6.316.022.224,92							100 %	0,00	
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						153.622.400,00						-		0,00	
		Jumlah dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerj yang disusun						153.622.400,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	9.127.400,00							5 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	144.495.000,00							1 Laporan	0,00	
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						9.127.400,00			-	-	Peningkatan Perlindungan Sosial dan pelestarian Budaya			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	9.127.400,00	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5 Dokumen	0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NUNUKAN,

																	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					144.495.000,00			-	-	Peningkatan Perlindungan Sosial dan pelestarian Budaya			0,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	144.495.000,00	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Laporan	0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NUNUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					4.740.453.634,92						ASN Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		0,00	
		Jumlah bulanan penyediaan gaji dan tunjangan ASN					4.740.453.634,92						ASN Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan		12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	4.740.453.634,92							12 Orang/bulan	0,00	
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					4.740.453.634,92			-	-	Peningkatan Perlindungan Sosial dan pelestarian Budaya			0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan		12 Orang/bulan	45 Orang/bulan	4.740.453.634,92	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Orang/bulan	0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NUNUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					240.226.850,00						-		0,00	

		jumlah unit kerja internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran						240.226.850,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	81.753.000,00							1 Laporan	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	16.951.440,00							1 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	4.495.160,00							1 Paket	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	137.027.250,00							1 Paket	0,00	
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						137.027.250,00			-	-	Peningkatan Perlindungan Sosial dan pelestarian Budaya			0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	137.027.250,00	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Paket	0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NUNUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						16.951.440,00			-	-	Peningkatan Perlindungan Sosial dan pelestarian Budaya			0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	16.951.440,00	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Paket	0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NUNUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						4.495.160,00			-	-	Peningkatan Perlindungan Sosial dan pelestarian Budaya			0,00	

		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	4.495.160,00	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Paket	0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NUNUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						81.753.000,00			-	-	Peningkatan Perlindungan Sosial dan pelestarian Budaya			0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	81.753.000,00	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Laporan	0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NUNUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						74.225.000,00						-		0,00	
		jumlah barang milik daerah yang dibutuhkan						74.225.000,00						-		0,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	74.225.000,00							5 Unit	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						74.225.000,00			-	-	Peningkatan Perlindungan Sosial dan pelestarian Budaya			0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	1 Unit	74.225.000,00	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5 Unit	0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NUNUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						862.849.680,00						-		0,00	
		Jumlah unit kerja internal yg memperoleh pelayanan administrasi perkantoran						862.849.680,00						-		0,00	

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	93.000.000,00							1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	760.669.680,00							1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	7.180.000,00							1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00							1 Laporan	0,00	
	2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.000.000,00			-	-	Peningkatan Perlindungan Sosial dan pelestarian Budaya			0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Laporan	0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NUNUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						93.000.000,00			-	-	Peningkatan Perlindungan Sosial dan pelestarian Budaya			0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	93.000.000,00	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Laporan	0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NUNUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						7.180.000,00			-	-	Peningkatan Perlindungan Sosial dan pelestarian Budaya			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	7.180.000,00	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Laporan	0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NUNUKAN, PEMBERDAYAAN

																	PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					760.669.680,00			-	-	Peningkatan Perlindungan Sosial dan pelestarian Budaya			0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	760.669.680,00	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Laporan	0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NUNUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					244.644.660,00						-		0,00	
		jumlah barang milik daerah yang dibutuhkan					244.644.660,00						-		0,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit		4 Unit	4 Unit	44.644.660,00							4 Unit	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	200.000.000,00							1 Unit	0,00	
	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					44.644.660,00			-	-	Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Untuk Kelancaran Arus Perdagangan Barang dan Jasa			0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit		4 Unit	4 Unit	44.644.660,00	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Unit	0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NUNUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					200.000.000,00			-	-	Peningkatan Perlindungan Sosial dan pelestarian Budaya			0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Unit	0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NUNUKAN,

																	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
8.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**						**432.814.000,00**								**0,00**	
NO	**KODE**	**URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT**	**INDIKATOR**	**TARGET AKHIR RENSTRA**	**REALISASI 2025**	**PRAKIRAAN 2026**	**CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**							**KELOMPOK SASARAN**	**PRAKIRAAN MAJU 2028**		**PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB**
							TARGET 2027	**PAGU INDIKATIF**	**LOKASI**	**SUMBER DANA**	**PRIORITAS**				**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	
											NASIONAL	**PROVINSI**	**DAERAH**				
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**	**(14)**	**(15)**	**(16)**	**(17)**	**(18)**
		Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan						***432.814.000,00***								***0,00***	
			999.Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	2.46 Persentase		2.43 Persentase	2.44 Persentase	432.814.000,00							2.45 Persentase	0,00	
			-	-		-	-	0,00							-	0,00	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota						354.391.750,00						-		0,00	
		Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG						354.391.750,00						-		0,00	
			Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	-		-	-	73.631.750,00							-	0,00	
			Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	-		-	-	280.760.000,00							-	0,00	
	2.08.02.2.01.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota						73.631.750,00			-	-	Peningkatan Perlindungan Sosial dan pelestarian Budaya			0,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan kab/ kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	-		-	1 Laporan	73.631.750,00	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NUNUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0015	Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota						280.760.000,00			-	-	Peningkatan Perlindungan Sosial dan pelestarian Budaya			0,00	

		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	-		-	50 Lembaga	280.760.000,00	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NUNUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota						0,00						-		0,00	
		-						0,00						-		0,00	
			Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	-	0,00							-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.08.02.2.02.0013	Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota						0,00			-	-	Peningkatan Perlindungan Sosial dan pelestarian Budaya			0,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	5 Lembaga	0,00	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NUNUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota						78.422.250,00						-		0,00	
		Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang Mendapat penguatan dan pengembangan						78.422.250,00						-		0,00	
			Jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	-	78.422.250,00							-	0,00	
	2.08.02.2.03.0015	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kab/Kota						78.422.250,00			-	-	Peningkatan Perlindungan Sosial dan pelestarian Budaya			0,00	

		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Pendampingan SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	25 Orang	78.422.250,00	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NUNUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
9.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**						**56.907.050,00**								**0,00**	
		Menurunnya kekerasan terhadap perempuan						***56.907.050,00***								***0,00***	
			999.Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO per 10.000 Penduduk Perempuan	100 Rasio		100 Rasio	100 Rasio	56.907.050,00							100 Rasio	0,00	
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota						19.762.500,00						-		0,00	
		Jumlah perempuan yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan						19.762.500,00						-		0,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kab/Kota	-		-	-	19.762.500,00							-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.08.03.2.02.0014	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						19.762.500,00			-	-	Peningkatan Perlindungan Sosial dan pelestarian Budaya			0,00	
		Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kab/Kota	-		-	4 Orang	19.762.500,00	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NUNUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						37.144.550,00						-		0,00	
		Jumlah perempuan yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan						37.144.550,00						-		0,00	

			Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	-	37.144.550,00							-	0,00	
	2.08.03.2.03.0011	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota						37.144.550,00			-	-	Peningkatan Perlindungan Sosial dan pelestarian Budaya			0,00	
		Terlaksananya Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	50 Orang	37.144.550,00	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NUNUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
10.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**						**172.149.440,00**								**0,00**	
		Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak						***172.149.440,00***								***0,00***	
			999.Tingkat Partisipasi Aggkatan Kerja (TPAK) Perempuan	75.59 %		75.56 %	75.57 %	172.149.440,00							75.58 %	0,00	
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						172.149.440,00						-		0,00	
		Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang mendapatkan penguatan dan pengembangan						172.149.440,00						-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	5 Lembaga		5 Lembaga	5 Lembaga	172.149.440,00							5 Lembaga	0,00	
	2.08.04.2.02.0007	peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota						172.149.440,00			-	-	Peningkatan Perlindungan Sosial dan pelestarian Budaya			0,00	

		Terlaksananya peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	5 Lembaga		5 Lembaga	5 Lembaga	172.149.440,00	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5 Lembaga	0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NUNUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
11.	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**						**194.887.500,00**								**0,00**	
		Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak						***194.887.500,00***								***0,00***	
			999.Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan data Gender dan Anak Sebagai Dasar Perencanaan Pembangunan	38 %		22 %	26 %	194.887.500,00							30 %	0,00	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						194.887.500,00						-		0,00	
		Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki data gender dan anak						194.887.500,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak tingkat Kab/Kota yang Tersedia	-		-	-	194.887.500,00							-	0,00	
	2.08.05.2.01.0007	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kab/Kota						194.887.500,00			-	-	Peningkatan Perlindungan Sosial dan pelestarian Budaya			0,00	
		Tersedianya Data Gender dan Anak tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak tingkat Kab/Kota yang Tersedia	-		-	1 Dokumen	194.887.500,00	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NUNUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
12.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**						**176.943.940,00**								**0,00**	
		Terjaminnya Hak Anak						***176.943.940,00***								***0,00***	
			999.Persentase Kecamatan Layak Anak	100 %		100 %	100 %	176.943.940,00							100 %	0,00	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota						176.943.940,00						-		0,00	
		Jumlah Lembaga PHA						176.943.940,00						-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

			Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	-		-	-	176.943.940,00							-	0,00	
	2.08.06.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Kab/Kota						176.943.940,00			-	-	Peningkatan Perlindungan Sosial dan pelestarian Budaya			0,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	-		-	2 Lembaga	176.943.940,00	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						-	0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NUNUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
13.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**						**138.782.650,00**								**0,00**	
		Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan						***98.597.650,00***								***0,00***	
			999.Rasio Kekerasan Terhadap Anak termasuk (per 10.000 anak)	8 Rasio		8 Rasio	8 Rasio	98.597.650,00							8 Rasio	0,00	
			-	-		-	-	40.185.000,00							-	0,00	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						24.754.000,00						-		0,00	
		Jumlah anak yang mendapatkan layanan pengaduan kekerasan						24.754.000,00						-		0,00	
			Jumlah Kerjasama yang melibatkan para pihak baik pemerintah maupun lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dalam pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) di tingkat Kabupaten/Kota	-		-	-	24.754.000,00							-	0,00	
	2.08.07.2.01.0012	Kerjasama pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Kab/Kota						24.754.000,00			-	-	Peningkatan Perlindungan Sosial dan pelestarian Budaya			0,00	
		Terlaksananya kerjasama para pihak termasuk pemerintah dan lembaga non pemerintah termasuk lembaga masyarakat dalam pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) di tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama yang melibatkan para pihak baik pemerintah maupun lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dalam pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) di tingkat Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	24.754.000,00	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						-	0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NUNUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						40.185.000,00						-		0,00	
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		-						40.185.000,00						-		0,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	-	40.185.000,00							-	0,00	
	2.08.07.2.02.0017	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						40.185.000,00			-	-	Peningkatan Perlindungan Sosial dan pelestarian Budaya			0,00	
		Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	10 Orang	40.185.000,00	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NUNUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						73.843.650,00						-		0,00	
		jumlah anak yang menerima layanan perlindungan khusus daerah kab/kota						73.843.650,00						-		0,00	
			Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-		-	-	47.737.650,00							-	0,00	
			Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-		-	-	26.106.000,00							-	0,00	
	2.08.07.2.03.0016	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota						26.106.000,00			-	-	Peningkatan Perlindungan Sosial dan pelestarian Budaya			0,00	
		Terlaksananya Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-		-	2 Orang	26.106.000,00	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NUNUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

	2.08.07.2.03.0017	Kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota						47.737.650,00			-	-	Peningkatan Perlindungan Sosial dan pelestarian Budaya			0,00	
		Terlaksananya kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-		-	1 Dokumen	47.737.650,00	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NUNUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	J U M L A H							**9.912.379.362,92**								**0,00**	

2.5 Penelahaan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Program kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukandiperoleh dari upaya untuk menjawab permasalahan yang timbul dalam internal dinas dengan mengakomodasi usulan/ prososal dari masyarakat serta mempertimbangkan upaya peningkatan pelayanan Perangkat Daerah. Untuk penelaahan usulan program/kegiatan untuk masyarakat telah dirangkum dalam RKPD dan sudah masuk dalam Renja Perangkat Daerah, sehingga kegiatan yang ada sudah terakumulasi dalam Ranwal Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional pada Rencana Kerja (Renja) dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Republik Indonesia. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, yang dimaksud dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial ialah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Dimana diperlukan peran masyarakat yang seluas luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga kesejahteraan sosial asing dalam hal ini (stakeholder) demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Visi nasional pembangunan jangka panjang adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Visi pembangunan nasional tahun 2025 –2045 mengarahkan Indonesia menjadi negara kesatuan yang kokoh, solid dalam persatuan, memiliki kedaulatan penuh atas politik, hukum, dan wilayahnya, serta mampu hadir sebagai bangsa maju yang setara dengan negara-negara maju dunia. Visi ini juga menegaskan bahwa seluruh proses pembangunan harus berlangsung secara berkelanjutan sehingga mampu menjaga kualitas lingkungan hidup, menjaga keseimbangan ekologi, serta menjamin kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang.

Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) **misi** pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Transformasi Sosial

   Adalah upaya mewujudkan peningkatan kualitas manusia Indonesia melalui perbaikan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Misi ini menekankan pembangunan manusia sepanjang hayat untuk menghasilkan SDM yang sehat, cerdas, produktif, berbudaya, berkarakter Pancasila, serta memiliki daya adaptasi tinggi menghadapi perubahan global. Transformasi sosial diwujudkan melalui penyediaan layanan dasar yang mudah diakses seluruh masyarakat, peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja,

penguatan perlindungan sosial adaptif, dan pengurangan kesenjangan multidimensi.

2. Transformasi Ekonomi

   Adalah usaha memperkuat struktur ekonomi nasional melalui peningkatan produktivitas, inovasi, penguasaan teknologi, dan percepatan industrialisasi. Pembangunan ekonomi diarahkan agar lebih berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan melalui transformasi ekonomi hijau, digitalisasi, dan penguatan UMKM. Misi ini menekankan integrasi sistem produksi nasional, pengembangan riset dan inovasi, peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi, serta penguatan kapasitas ekonomi domestik untuk mampu bersaing di tingkat global.

3. Transformasi Tata Kelola

   Adalah upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi. Reformasi regulasi, birokrasi, dan pelayanan publik ditempuh guna membangun lembaga pemerintahan yang efektif dan responsif. Transformasi tata kelola dilakukan melalui deregulasi, penguatan birokrasi berbasis merit, penggunaan teknologi digital dalam pelayanan publik, serta peningkatan kapasitas kelembagaan untuk memastikan pembangunan berjalan efisien, efektif, dan bebas korupsi.

4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Ketahanan Nasional

   Adalah upaya menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, stabil, demokratis, dan menjunjung tinggi hukum yang adil. Misi ini mencakup penegakan hukum yang berkeadilan tanpa diskriminasi, penguatan lembaga peradilan, peningkatan keamanan nasional, serta pemantapan pertahanan negara yang modern dan profesional. Mewujudkan supremasi hukum dan stabilitas nasional dilakukan dengan memperkuat TNI–Polri, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman, memperluas akses keadilan, dan memastikan perlindungan hak warga negara.

5. Ketahanan Sosial, Budaya, dan Lingkungan

   Adalah upaya memperkuat karakter bangsa, meningkatkan kesejahteraan sosial yang inklusif, melestarikan kebudayaan nasional, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pembangunan diarahkan untuk memperkuat kohesi sosial, memperhatikan kelompok rentan, mengurangi kesenjangan, serta membangun budaya nasional yang kuat di tengah globalisasi. Pada aspek lingkungan, misi ini menekankan perlindungan ekosistem, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, serta peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana.

6. Pemerataan Pembangunan Kewilayahan

   Adalah upaya mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia. Pembangunan tidak lagi terpusat di satu kawasan tetapi diarahkan untuk

menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta mengurangi kesenjangan antar daerah. Misi ini menekankan peningkatan akses masyarakat terhadap layanan dasar, percepatan pembangunan wilayah tertinggal, kawasan perbatasan, dan desa, serta pemerataan infrastruktur untuk mendukung mobilitas ekonomi dan sosial.

7. Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas, Tangguh, dan Berkelanjutan

   Adalah upaya mengembangkan infrastruktur nasional yang modern, terintegrasi, dan ramah lingkungan. Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional, mendukung transformasi ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Termasuk di dalamnya infrastruktur dasar, infrastruktur energi bersih, transportasi massal, digitalisasi, dan pembangunan kota cerdas yang memperhatikan kelestarian lingkungan dan ketahanan terhadap bencana.

8. Kesinambungan Pembangunan

   Adalah upaya memastikan seluruh proses pembangunan berjalan secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan antarperiode pemerintahan. Misi ini menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan, konsistensi perencanaan, penguatan monitoring dan evaluasi berbasis data, serta pengelolaan pembangunan yang mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pemerataan sosial, dan kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, dimana pencapaian target-target tersebut merupakan ukuran dari keberhasilan kinerja faktor-faktor penentu keberhasilan suatu organisasi. Oleh karena itu, tujuan merupakan bagian integral dari proses manajemen strategi yang didalamnya mengandung usaha untuk melaksanakan keinginan.

Sasaran organisasi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi.. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Tujuan dan sasaran kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan2025-2029 mendukung misi 2 dalam RPJMD Kabupaten Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 yaitu "***Membangun Perekonomian Daerah yang Produktif, Berkelanjutan dan Berkeadilan***". Berikut tujuan dan sasaran Dinas Sosial,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukantahun 2027 sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan 2025-2029:

Tabel 3.2.1

Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Baseline 2024	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Menguatnya Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Kelompok Rentan**		**Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks)**	**54,94%**	**54,94%**	**54,94%**	**54,94%**	**54,94%**	**54,94%**	**54,94%**
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Indeks)	**73,85**	**73,86**	**73,87**	**73,88**	**73,89**	**73,90**	**73,91**
		1. Meningkatnya Penanganan dan Pemberdayaan Sosial PPKS	Persentase PPKS yang mendapatkan Pemberdayaan Sosial (%)	40	43	46	49	52	55	58
			Persentase PPKS yang mendapatkan penanganan Rehabilitasi Sosial (%)	94	95	96	97	98	99	99.1
			Persentase PPKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial (%)	75	76	77	78	79	80	81
		2. meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (%)	84,14	84,49	84,50	84,52	84,53	84,53	84,55
			Persentase Pelayanan dan Pendampingan Kekerasan Terhadap PerempuanÂ danÂ Anak (%)	0	50	51	52	53	54	55
		3. Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Predikat Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	B	B	B	B	BB	BB	A

3.3 Program dan Kegiatan

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota, sebagai berikut :

a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan PD;
- Koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;

b) Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;

c) Adminitrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;

d) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Mebel;

e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan Jasa Pemelihaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Laporan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2) Program Pemberdayaan Sosial

a) Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat terpencil (KAT)

- Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT

b) Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Koordinasi dan Singkronisasi Penertiban Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang

c) Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

- Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

- Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota;
- Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kewenangan Kabupaten/Kota;
- Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota;
- Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi
- Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

3) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

a) Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
   - Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

4) Program Rehabilitasi Sosial

a) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
   - Penyediaan Permakanan;
   - Penyediaan Alat Bantu;
   - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
   - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
   - Pemberian Layanan Kedaruratan
   - Pemberian Layanan Rujukan
   - Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota

b) Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti
   - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga;

c) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosia
   - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
   - Penyediaan Sandang;

5) Program Pelayanan Perlindungan Dan Jaminan Sosial

a) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
   - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;

- Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
- Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
- Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

6) Program Penanganan Bencana

a) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

- Penyediaan Makanan;
- Penyediaan Sandang;
- Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan;
- Pelayanan Dukungan Psikososial;
- Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi

b) Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

- Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
- Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda
- Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana

7) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

a) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

- Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
- Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota;
- Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

8) PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

a) Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
- Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota

b) Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

- Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota

c) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

- Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kab/Kota

9) PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

a) Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

- Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota

b) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota

10) PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

a) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

11) PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

a) Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kab/Kota

12) PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

a) Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

- Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Kab/Kota

13) PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

a) Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

- Kerjasama pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Kab/Kota

b) Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota

c) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota
- Kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukanyaitu sebagai berikut:

1. Menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, penyusunan RPD yang berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan yang mengacu pada RPJPD untuk keselarasan program/ kegiatan pembangunan yang kerkelanjutan;
2. Mengarahkan pada penanganan permasalahan dan isu strategis dalam pelaksanaan pelayanan Sosial Kabupaten Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan sebagaimana tertuang dalam Renstra Tahun 2025-2029.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukanuntuk tahun 2027 sesuai dengan tugas dan fungsi Kepala Bidang, masing-masing terdiri dari 13 (Tiga Belas) Program, 28 (Dua Puluh Delapan) kegiatan dan 61(Enam Puluh Satu) Sub Kegiatan, dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 4.1.1

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Sasaran Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
1	Meningkatnya Penanganan dan Pemberdayaan Sosial PPKS	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**
		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)
		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
		Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitasi Terlantar,Lanjut Usia Terlantar ,serta Gelandangan pengemis di luar panti Sosial
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

No	Sasaran Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
2	meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Lokasi Program/ kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027, berdasarkan pada sebaran Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS) dan meningkatkan meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, dengan kriteria untuk segera mendapat penanganan. Sehubungan hal tersebut dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, dibutuhkan dana

sebesar Rp. 9.912.379.362.92,-(Sembilan Milyar Sembilan Ratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Dua Koma Sembilan Dua Rupiah), yang bersumber dari APBD Kabupaten Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan.

Rumusan Program/ kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten NunukanTahun 2027 telah sesuai dengan rancangan awal RKPD baik jumlah program/kegiatan dan pagu indikatif. Adapun program dan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan Tahun 2027 sesuai dengan tabel renja pada Tabel 4.1.2 :

BAB V
PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2027 disusun sebagai dokumen perencanaan yang meliputi program dan kegiatan yang didalamnya menggambarkan capaian kinerja anggaran. Pelaksanaan Penyusunan serta penetepan program dan kegiatan pembangunan di dalam Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional dibidang Sosial dan Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak. Program dan kegiatan untuk menccapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana strategis (Renstra) 2025-2029 tersebut. Yang dalam pelaksanaannya menerapkan prinsip – prinsip efesiensi, evektifitas, Trasnparansi, akuntabilitas dan partisipasi dan diharapkan kaidah kaidah pelaksanaannya akan lebih erkoordinasi, terintegrasi dan senergis serta berkelanjuta dengan perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.

Dalam penyusunan Rancangan awal renja ini perlu disusun beberapa kaidah kaidah yang terkait pelaksanaan program/kegiatan yang meliputi:

a. Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2027, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjsama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang;
b. Melaksanakan perencanaan dan penganggaran yang berpedoman terhadap RPJPD dan Renstra yang telah disusun dan mengacu pada RKPD memuat kebijakan, Program / Kegiatan
c. Mempedomani urusan yang telah diatur sesuai Undang undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah yang sesuai dengan urusan Konkuren Pemerintah Daerah:
d. Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Nunukan harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya;
e. Rencana kerja Dinas sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Nunukan Tahun 2027 diharapkan mejadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintah dibidang Sosial dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak Kab. Nunukan

Nunukan, 20 Juli 2026
KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NUNUKAN

FARIDAH ARYANI, SE.M.AP
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19681128 199103 2 005